

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Dewasa ini, di kala dunia ilmu pengetahuan semakin mengalami perkembangan, para peneliti semakin mengembangkan serta menerapkan ilmunya tidak terkecuali terkait ilmu syariah. Indonesia kini telah memiliki perkembangan yang cukup pesat dalam penerapan hukum syariah di berbagai bidang termasuk bidang keuangan dan perbankan. Bahkan Indonesia menjadi salah satu penggerak atau pembangkit pengembangan industri perbankan syariah di wilayah ASEAN bersama dengan Malaysia. Walaupun perkembangan bank syariah di Indonesia dinilai lebih lambat disamakan dengan Malaysia, namun Indonesia termasuk gencar dalam mengembangkan industri perbankan syariah (Ghozali et al., 2019, hal. 1).

Di mulai pada tahun 1992 pada saat Bank Muamalat Indonesia berdiri, bank mulai didefinisikan menjadi dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (Marimin et al., 2015, hal. 77). Sebagaimana yang terdapat pada UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan, bahwasanya bank umum merupakan aktivitas bisnis secara konvensional maupun dengan prinsip syariah yang dapat memberi fasilitas jasa pada laju pembayaran, sedangkan bank perkreditan rakyat (BPR) ataupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan aktivitas bisnis secara konvensional maupun dengan prinsip syariah namun tidak dapat memberi fasilitas jasa dalam laju pembayaran dalam kegiatannya.

Perkembangan bank umum syariah (BUS) maupun BPRS di Indonesia cukup pesat. Perkembangan ini didukung oleh kehadiran UU Nomor 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah yang membahas terkait legalisasi kehadiran perbankan syariah di Indonesia dengan berbagai karakteristiknya. Perkembangan ini dapat dilihat dari angka total bank BUS yang mengalami peningkatan, walaupun pada Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami penurunan bank konvensional yang memiliki UUS, namun jumlah bank BPRS berjumlah sangat besar. Tercatat dalam data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan jumlah BUS di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan, sedangkan UUS memiliki penurunan begitu

pun dengan jumlah BPRS menurun dan pada tahun 2020 jumlahnya cukup fluktuatif.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Bank Perbankan Syariah

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020			
					Jan	Feb-Apr	May-Aug	Sep-Dec
<b>Bank Umum Syariah</b>								
Jumlah Bank	13	13	14	14	14	14	14	14
<b>Unit Usaha Syariah</b>								
Jumlah Bank	21	21	20	20	20	20	20	20
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah</b>								
Jumlah Bank	166	167	167	164	164	163	162	163

Sumber : OJK, 2020

Berdasarkan data tabel 1, terlihat bahwa BUS mengalami kenaikan berdasarkan total bank selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 hingga tahun 2017 berjumlah 13 bank, lalu berkembang pada tahun 2018 hingga saat ini menjadi 14 bank. Lalu pada UUS terdapat penurunan Bank Konvensional yang memiliki UUS yaitu pada tahun 2016 dan 2017 terdapat 21 bank, lalu pada tahun 2018 hingga 2020 menjadi 20 bank yang disebabkan oleh adanya peraturan UU nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa UUS diwajibkan *spin-off* menjadi BUS jika asetnya telah mencapai 50% dari total nilai induknya. Sedangkan pada BPRS angka jumlah bank tergolong besar namun seiring berjalannya waktu selama 5 tahun terakhir jumlahnya berkurang, yaitu pada tahun 2016 berjumlah 166 bank, lalu pada tahun 2017 bertambah menjadi 167 bank hingga tahun 2018, selanjutnya di tahun 2019 terjadi kemerosotan lagi sehingga total bank menjadi 164, lalu pada tahun 2020 jumlah bank BPRS mengalami fluktuatif di mana pada bulan Januari berjumlah 164 namun pada bulan Februari hingga bulan April menjadi 163 bank, lalu pada bulan Mei hingga bulan Agustus mengalami penurunan lagi menjadi 162 bank, dan pada akhirnya pada bulan September hingga bulan Desember mengalami kenaikan lagi menjadi 163 bank (OJK, 2020).

Kesimpulan dari data pada tabel 1 adalah jumlah BPRS cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah BUS. Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan analisis terkait perbandingan efisiensi BUS dengan BPRS. Efisiensi sebuah bank mampu dikatakan tercapai ketika bank terkait

dapat melakukan operasi pada skala yang konsisten (*constant return to scale*). Efisiensi alokasi mampu diraih saat bank yang bersangkutan dapat melakukan maksimalisasi laba melalui berbagai *output*, serta untuk efisiensi teknis berhubungan dengan relasi antara *input* dengan *output* pada operasi produksi. Operasi produksi tersebut dapat disebut efisien ketika *input* yang digunakan dapat mengeluarkan *output* yang maksimum (Novandra, 2012, hal. 187).

Salah satu kriteria dalam pengukuran tingkat kesehatan atau efisiensi bank adalah kesanggupan bank dalam memperoleh profit. Penilaian pada faktor profit bank dapat dinilai melalui evaluasi terhadap beberapa elemen, di antaranya adalah *Return on Assets* (ROA), biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Interest Margin* (NIM) (Arif & Rahmawati, 2018, hal. 242).

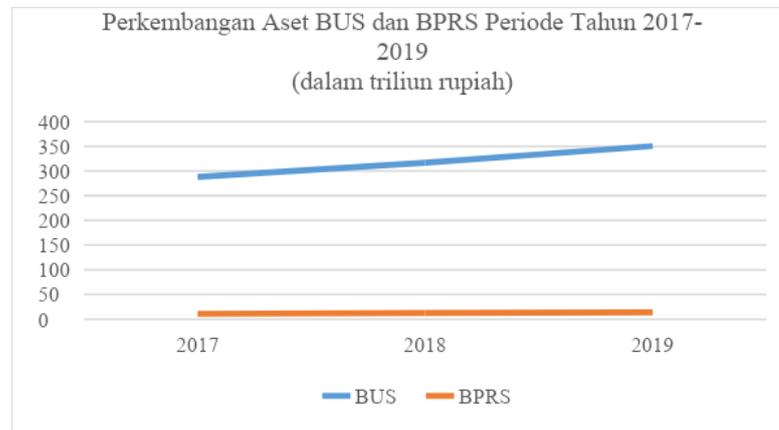
Tabel 2. Perkembangan Kinerja Keuangan BUS dan BPRS (%)

Tahun	Indikator Kinerja					
	BUS			BPRS		
	ROA	BOPO	CAR	ROA	BOPO	CAR
2017	0,63	94,91	17,91	2,55	85,34	20,81
2018	1,28	89,18	20,39	1,87	87,66	19,33
2019	1,73	84,85	20,59	2,61	84,12	17,99

Sumber : OJK (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 2, dapat disebutkan bahwasanya ROA pada BPRS lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan dengan ROA pada BUS, ROA sebagai pengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba terlihat bahwa BPRS dalam menjalankan usahanya memiliki kemampuan manajemen lebih baik dibandingkan dengan BUS. Lalu, berdasarkan data di atas, BOPO pada BUS secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan BOPO pada BPRS, BOPO sebagai alat ukur tingkat efisiensi kesanggupan bank saat menjalankan kegiatan usahanya di mana ketika nilai BOPO semakin tinggi, maka bank terkait semakin tidak efisien, yang berarti dapat disimpulkan bahwa BPRS mempunyai tingkat efisiensi lebih baik disamakan dengan BUS. Selanjutnya, tingkat CAR pada BUS dan BPRS mengalami perbedaan, di mana CAR pada BUS semakin berjalannya tahun mengalami kenaikan, sedangkan CAR pada BPRS semakin berjalannya tahun mengalami penurunan, CAR sebagai tingkat kecukupan modal di mana ketika nilai

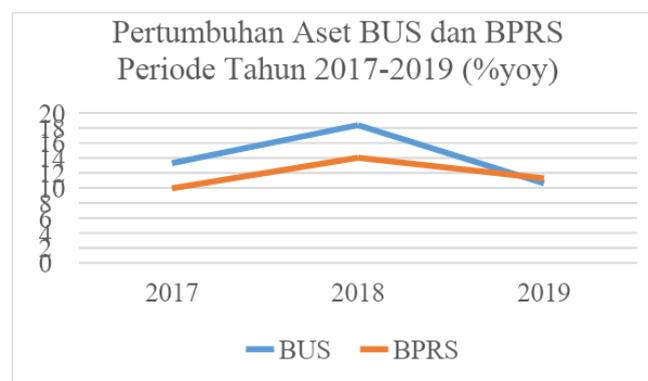
CAR semakin besar, maka semakin besar tingkat kesanggupan bank guna menangani risiko pada tiap kredit yang memiliki risiko, maka dapat disimpulkan bahwa BUS semakin baik dalam hal kesanggupan menanggung risiko, namun sebaliknya BPRS semakin menurun kemampuannya untuk menanggung risiko.



Sumber : OJK (data diolah)

Gambar 1. Perkembangan Aset BUS dan BPRS Periode Tahun 2017-2019

Bersumber pada data di gambar 1, dapat dikatakan bahwasanya kedua bank yaitu BUS maupun BPRS mengalami peningkatan aset setiap tahunnya. Pada BUS di tahun 2017 memiliki aset sebesar Rp288,02 triliun, sedangkan di BPRS memiliki aset sebesar Rp10,84 triliun. Selanjutnya, pada tahun 2018, BUS memiliki aset sebesar Rp316,69 triliun, sedangkan BPRS memiliki aset sebesar Rp12,36 triliun. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2019, BUS memiliki aset sebesar Rp350,36 triliun, dan BPRS memiliki aset sebesar Rp13,76 triliun.



Sumber : OJK (data diolah)

Gambar 2. Pertumbuhan Aset BUS dan BPRS Periode Tahun 2017-2019

Aset perkembangan syariah secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan yang positif, walaupun mengalami pelemahan kecepatan jika disandingkan tahun

sebelumnya. Di mana berdasarkan data di atas BUS pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 13,31%, sedangkan BPRS mengalami pertumbuhan sebesar 18,38%. Selanjutnya, pada tahun 2018 BUS mengalami pertumbuhan aset sebesar 9,95%, dan BPRS mengalami pertumbuhan aset sebesar 14,03%. Lalu, pada tahun 2019 BUS memiliki pertumbuhan aset sebesar 10,63%, dan BPRS mengalami pertumbuhan aset sebesar 11,30%. Berlandaskan data di gambar 2, maka dapat disebutkan bahwa pertumbuhan aset BUS dan BPRS mengalami pertumbuhan yang lambat walaupun tetap positif, maka hal ini memperkuat masalah penelitian di mana kenyataannya di lapangan faktor modal atau CAR lebih berperan dalam pertumbuhan aset.

Berdasarkan data pada tabel 1 bahwa angka jumlah kantor BPRS sangat besar namun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkembangannya, perbankan syariah tidak selalu berjalan mulus. Walaupun berdasarkan tingkat efisiensi berdasarkan nilai BOPO tergolong cukup efisien, namun dari sisi kecukupan modal untuk menanggung risiko BPRS mengalami penurunan seiring berjalannya waktu. Dikutip dari Liputan6 (2020), bahwa sejak tahun 2005 terdapat setidaknya 102 BPR termasuk di dalamnya BPRS yang ditutup oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini disebabkan berbagai faktor yang salah satunya adalah kecurangan pada internal bank (Praditya, 2020). Sebelumnya hal yang sama terjadi juga pada tahun 2019 di mana dikutip dari CNBC Indonesia (2019), bahwa LPS menutup 6 BPR ataupun BPRS yang disebabkan oleh faktor banyaknya kredit macet, kualitas aktiva produktif macet, dan rasio modal minimum menurun drastis (Sidik, 2019).

Ditutupnya BPRS tidak dapat dipungkiri dapat disebabkan oleh faktor keefisienannya dalam menjalankan usahanya. Maka tingkat efisiensi dinilai penting dalam kegiatan usaha suatu bank. Pengukuran efisiensi bank dapat diukur menggunakan beberapa teknik serta dengan berbagai pendekatan, di antaranya adalah pendekatan rasio keuangan serta pendekatan *Operating Research* (OR). Pendekatan rasio keuangan secara umum menunjuk kepada tingkat kinerja keuangan bank, contohnya seperti nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return on equity* (ROE), *Return on Asset* (ROA), *Cost to income ratio* (CIR), serta *Operating efficiency ratio* (OER). Di sisi lain, pendekatan OR melakukan pengukuran efisiensi

memakai berbagai cara yang di antaranya ialah teknik parametrik metode *Distribution-Free Approach* (DFA), *Stochastic Frontier Approach* (SFA), serta *Recursive Thick Frontier Approach* (RTFA), selain itu juga dapat memakai teknik non-parametrik dengan metode (*Data Envelopment Analysis* (DEA), dan *Free Disposable Hull* (DFH) analisis (Hidayat, 2014, hal. 69).

Naufal (2017) telah melakukan sebuah penelitian terkait dengan efisiensi BPRS di wilayah Jabodetabek dengan memakai pendekatan *Two Stage Data Envelopment Analysis* (DEA). Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa dari 12 BPRS wilayah Jabodetabek selama tahun 2015 hingga 2016 seluruhnya mempunyai efisiensi yang fluktuatif (Naufal & Firdaus, 2017, hal. 218). Sedangkan Firdaus & Hosen (2013) melakukan penelitian terkait efisiensi BUS dengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu *Two Stage Data Envelopment Analysis* (DEA). Kesimpulan dari penelitian tersebut memperlihatkan bahwa bank syariah di Indonesia pada saat waktu penelitiannya, belum mencapai level efisiensi yang optimal (Firdaus & Hosen, 2013, hal. 187). Selanjutnya, Ramly & Hakim (2017) juga telah menjalankan penelitian terkait perbandingan pemodelan efisiensi bank syariah dengan bank konvensional. Metode yang dipakai pada penelitian tersebut yaitu pendekatan non-parametrik DEA serta regresi data panel yang dalam metode tersebut memakai variabel *input* dan *output* dengan dasar pendekatan intermediasi serta mengomparasi nilai perbandingan efisiensi dengan metode *Independent sample t test*. Kesimpulan pada penelitian tersebut ialah terlihat bahwa efisiensi bank syariah dan bank konvensional memiliki tingkatan yang berbeda, serta terlihat faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap efisiensi bank yaitu ROA, CAR, dan FDR (Ramly & Hakim, 2017).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai efisiensi di BUS maupun di BPRS, menunjukkan bahwa kondisi BUS dan BPRS di Indonesia belum efisien dengan optimal secara empiris. Selain itu, pada penelitian terdahulu terdapat penelitian terkait perbandingan efisiensi BUS dengan Bank Konvensional, namun masih sedikitnya informasi maupun penelitian terkait perbandingan BUS dengan BPRS serta telah lampunya data yang dipakai pada penelitian yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadi motivasi peneliti untuk menjalankan penelitian terkait hal ini.

Data yang dipakai pada penelitian ini memakai data sekunder berupa data yang didapatkan dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data yang dipakai yaitu data yang dipublikasi oleh OJK berupa data laporan keuangan perbankan terkhusus pada BUS dan BPRS pada periode 2017-2019. BUS dan BPRS yang akan dijadikan objek adalah 5 BUS terbesar yaitu Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, serta Bank BCA Syariah serta 5 BPRS terbesar yaitu BPRS Patriot Bekasi, BPRS Harta Insan Karimah Kota Parahyangan, BPRS Baiturridha Pusaka, BPRS Amanah Rabbaniah, dan BPRS Amanah Ummah. Peneliti memilih BPRS di Jawa Barat karena BPRS di Jawa Barat memiliki aset, pembiayaan, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) paling besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia dengan aset sebesar Rp4.676.923, pembiayaan sebesar Rp3.429.187, dan DPK sebesar Rp2.990.399 dalam jutaan rupiah (OJK, 2020).

Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu metodologi kuantitatif dengan teknik analisis memakai *Data Envelopment Analysis* (DEA) berguna sebagai pengukur efisiensi BUS dan BPRS serta menggunakan uji beda sampel *independent t test* untuk melihat perbandingan efisiensi BUS dengan BPRS. Variabel *input* yang dipakai untuk pengujian menggunakan DEA yaitu simpanan, aset tetap dan biaya operasional serta dengan *output* yang dipakai berupa pembiayaan dan laba operasional. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menginvestigasi serta melakukan analisis perbandingan efisiensi antara BUS dan BPRS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil berupa tingkatan efisiensi BUS dan BPRS yang ada di Jawa Barat, serta diharapkan dapat bermanfaat bagi BUS maupun BPRS bersangkutan sebagai bahan evaluasi atau acuan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berlandaskan yang telah dipaparkan pada latar belakang, dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi pembiayaan pada BUS dan BPRS?
2. Bagaimana perbandingan efisiensi pembiayaan BUS dengan BPRS di Jawa Barat?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tingkat efisiensi pembiayaan pada BUS dan BPRS
2. Untuk menganalisis perbandingan efisiensi pembiayaan BUS dengan BPRS di Jawa Barat

### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

#### **I.4.1 Aspek Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memiliki manfaat bagi masyarakat umum sebagai referensi pada penelitian-penelitian serta sebagai sumber informasi pengetahuan serta sebagai k ajian ilmiah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta terkait efisiensi pembiayaan BUS dengan BPRS.

#### **I.4.2 Aspek Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat secara praktis sebagai berikut :

1. Bagi praktisi

Sebagai sarana untuk evaluasi pada terkait efisiensi pembiayaan pada BUS dan BPRS.

2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk belajar dan mencari wawasan yang lebih luas untuk dipraktekkan di masyarakat.

3. Bagi regulator

Penelitian ini bermanfaat bagi regulator dalam menentukan kebijakan terkait BUS dan BPRS agar lebih baik kedepannya.